

ANALISIS KINERJA APBD PROVINSI DI INDONESIA : SEBUAH STUDI MENGENAI RASIO KEUANGAN, KORELASI METRIK DAN KLASTERISASI KINERJA

Cici Marlina^{1*}, Gugun Geusan Akbar²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut, Garut, Indonesia

*Korespondensi : cicimarlina011@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi di Indonesia dengan mempertimbangkan enam rasio keuangan utama. Menggunakan data dari tahun 2019 hingga 2022, penelitian ini memaparkan gambaran mendalam tentang kinerja keuangan provinsi melalui heatmap dan metrik korelasi. Selain itu, dengan menggunakan metode klasterisasi K-Means, provinsi-provinsi dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristik kinerja keuangan mereka. Hasil penelitian menunjukkan variasi signifikan dalam kinerja keuangan diantara provinsi, dengan beberapa provinsi menunjukkan kinerja yang kuat dalam beberapa metrik, sementara yang lain menunjukkan ruang untuk perbaikan. Analisis korelasi mengungkapkan hubungan yang signifikan antara beberapa metrik, memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai aspek kinerja keuangan saling berinteraksi. Klasterisasi memungkinkan identifikasi kelompok provinsi dengan karakteristik kinerja yang serupa. Memberikan dasar untuk analisis lebih lanjut dan rekomendasi kebijakan. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan ditingkat provinsi dan nasional, menyoroti area kinerja yang kuat dan area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Kata Kunci : Kinerja APBD, Rasio Keuangan Daerah, Klasterisasi K-Means, Desentralisasi Fiskal

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance of provincial Regional Budget (APBD) in Indonesia by considering six key financial ratios. Using data from 2019 to 2022, this study provides an in-depth look at provincial financial performance through heat maps and correlation matrices. In addition, using the K-Means clustering method, provinces are grouped based on the similarity of their financial performance characteristics. The results show significant variation in financial performance between provinces, with some provinces showing strong performance in some metrics, while others show room for improvement. Correlation analysis showed significant relationships between some metrics, providing insight into how different aspects of financial performance interact with each other. Clustering allows the identification of groups of provinces with similar performance characteristics. Provides important implications for policymakers at the provincial and national levels, highlighting areas of strong performance and areas that require further attention.

Keywords : APBD performance, Regional Financial Ratio, K-Means Clustering, Fiscal Decentralization

A. PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia telah berkembang pesat dengan diterapkannya otonomi daerah (Sari, 2014). Otonomi daerah merupakan kekuasaan daerah otonom yang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan keinginan berdasarkan aspirasi yang sudah ditetapkan, menurut peraturan perundang-undangan yang ada (Pramono, 2014). Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban pembangunan daerahnya dapat terlihat melalui hasil kinerja keuangan pemerintah daerah serta otonomi daerah. Pengukuran kinerja penting dilakukan ketika mengevaluasi tanggung jawab dari suatu organisasi serta manajer dengan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas tidak hanya sebagai kemampuan dalam menunjukkan seberapa efektif, efisien dan ekonomis dana publik, tetapi pengukuran kinerja berfungsi menjadi dasar evaluasi kinerja yaitu mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan program kegiatan organisasi (Ropa, 2016). Tujuan dari sistem pengukuran kinerja yang pertama untuk menyampaikan suatu strategi dengan lebih baik. Kedua, mengukur suatu kinerja keuangan dan non keuangan dengan seimbang untuk memantau kemajuan pelaksanaan strategi. Ketiga, beradaptasi dengan pemahaman kepentingan manajer baik tingkat menengah ataupun bawah dan memotivasi mereka agar mencapai keselarasan tujuan. Keempat, sebagai sarana untuk mencapai keberhasilan berdasarkan pendekatan akses individu serta keterampilan kolektif yang rasional (Aziz, 2016). Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahan

daerahnya secara efektif dan efisien yang dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan pelaksanaan pemerataan pembangunan dengan memperluas potensi daerahnya (Pilat & Morasa, 2017). Pada dasarnya menganalisis hasil kinerja keuangan pemerintah daerah bukan sekedar bentuk manajemen secara fundamental, tetapi juga membantu untuk memungkinkan seluruh pengguna laporan keuangan pemerintah daerah yang didalamnya termasuk masyarakat, untuk mengevaluasi kegiatan pemerintah daerah (Nugroho & Prasetyo, 2018).

Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis, transparan serta bertanggung jawab sehingga mencapai tujuan *good governance* dan *clean government* (Karlina & Handayani, 2017). Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia secara resmi mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001, pemerintah daerah harus dapat menjalankan pemerintahannya secara mandiri dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya dan harus bermanfaat bagi masyarakat serta mampu melayani masyarakat dengan sangat baik (Saputra et al., 2018). Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan roda pemerintahannya dengan kinerja yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta pemerataan pembangunan dengan mengembangkan segala peluang yang dimiliki setiap daerah, hal ini dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan (Arnaldi & Yusra, 2020).

Aspek penting yang diatur secara

cermat mengenai pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi diatur secara seksama merupakan persoalan mengelola ekonomi daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi secara luas, nyata serta bertanggung jawab dibutuhkan suatu pengelolaan keuangan daerah, yang mana mempunyai kemampuan mengendalikan dan mengatur kebijakan keuangan daerah secara ekonomi, efisien, transparan serta bertanggung jawab. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari bagaimana pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian secara terkendali, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, secara efektif, efisien, ekonomis, transparan serta bertanggung jawab. Evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada APBD yang wajib memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerah dalam menilai pemerintah daerah apakah telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau belum (Harahap, 2020). Salah satu cara dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dengan menganalisis kinerja keuangan pemerintah, pengelolaan keuangan yang baik oleh pemerintah mempengaruhi perkembangan daerah. Selain Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, pengelolaan keuangan yang baik juga membutuhkan kekuatan keuangan daerah yang memadai.

Analisis kapasitas keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada perkembangan ekonomi suatu daerah. Salah satu cara dalam menganalisis suatu kinerja keuangan daerah adalah dengan menganalisis rasio keuangan yang ditetapkan serta diimplementasikan dalam

APBD. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan analisis keterkaitan pelaksanaan APBD. Selain itu untuk memperluas cakupan pengelolaan perekonomian daerah, analisis keterkaitan untuk melaksanakan APBD juga bisa dijadikan alat untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prioritasnya, karena dengan adanya kebijakan tersebut memberikan kebebasan kepada daerah dalam mengelola perekonomian daerahnya, seharusnya mampu mendukung perekonomian untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah tersebut (Ropa, 2016). Analisis rasio keuangan yang dimasukkan dalam APBD dapat dijadikan acuan evaluasi kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah, untuk mengevaluasi efektivitas realisasi pendapatan, serta mengukur efisiensi belanja daerah, sehingga menjadi salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Hubungan yang timbul antara rasio keuangan daerah dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan perekonomian (Setianingrum & Haryanto, 2020). Analisis rasio keuangan adalah perhitungan rasio keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur untuk mengevaluasi keadaan keuangan dan hasil kinerja suatu perusahaan. Rasio keuangan merupakan angka-angka yang diperoleh dengan membandingkan suatu periode pelaporan keuangan dengan periode lainnya yang memiliki hubungan keterkaitan yang relevan dan bermakna (Malik, 2022).

Saputra et al. (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa hasil dari kinerja keuangan pemerintah daerah

dapat dilihat sebagai berikut : (1) variasi pendapatan tergolong dalam kategori baik, (2) rasio desentralisasi tergolong sangat buruk, (3) rasio kemandirian keuangan daerah tergolong sangat rendah dengan model hubungannya instruktif, artinya peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan pemerintah daerah, (4) pertumbuhan pendapatan tergolong pertumbuhan positif, karena pemerintah daerah mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja tahun sebelumnya, (5) varian belanja daerah tergolong baik, (6) keserasian dalam belanja pemerintah menggunakan anggarannya untuk kepentingan belanja operasi, (7) dengan mempertimbangkan efisiensi belanja pemerintah daerah tergolong efisien dalam penggunaan belanja daerah. Kajian penelitian yang dilakukan Harahap (2020) mengatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan dinilai baik, meskipun rasio desentralisasi tergolong rendah, masih tingginya ketergantungan pemerintah pusat/provinsi dan pendapatan PAD masih kurang dari target yang sudah ditentukan.

Penelitian sebelumnya hanya melakukan penelitian kinerja keuangan pada satu daerah saja. Pada penelitian ini melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah secara luas, kajian penelitian ini menganalisis secara detail perkembangan ekonomi daerah 34 provinsi di Indonesia selama 4 tahun anggaran melalui analisis rasio keuangan, diharapkan dapat memberikan hasil serta informasi terhadap kinerja keuangan pemerintah 34 provinsi di Indonesia menggunakan data dari tahun 2019 hingga 2022. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan penelitian ini yaitu bagaimana kinerja

keuangan pemerintah daerah 34 provinsi di Indonesia selama 4 tahun terakhir, pada tahun 2019 hingga 2022 dengan menggunakan rasio keuangan?. Dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada APBD diharapkan dapat menjadi alat ukur yang memungkinkan daerah untuk mengukur kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah 34 provinsi di Indonesia tahun 2019 hingga 2022 menggunakan rasio keuangan.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif menjelaskan, menggambarkan dan meringkas secara akurat tentang fakta melalui perhitungan kinerja keuangan 34 provinsi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data APBD 34 provinsi di Indonesia selama 4 tahun anggaran dari tahun anggaran 2019 sampai tahun 2022 (<https://djpk.kemenkeu.go.id/?=5412>).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan lain sebagainya terkait referensi yang disertakan dalam penelitian. Hasil penelitian kepustakaan nantinya akan dikumpulkan, diolah dan disajikan dalam bentuk tulisan yang merangkum hasil penelitian.

1. Analisis Rasio

Terdapat 6 analisis rasio yang akan digunakan untuk penelitian ini diantaranya rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio

efektivitas, rasio keserasian belanja operasi, rasio keserasian belanja modal dan rasio pertumbuhan pendapatan.

Analisis rasio yaitu suatu alat analisis yang dinyatakan dalam jumlah relative dan absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara satu unsur laporan keuangan dan lainnya. Analisis rasio keuangan dilakukan untuk membandingkan kinerja keuangan satu periode ke periode sebelumnya yang telah dicapai. Selain itu analisis rasio keuangan daerah dapat dilihat dalam membandingkan rasio keuangan suatu daerah, dengan daerah lainnya yang relatif sama untuk mengetahui kinerja dari pemerintah daerah (Setianingrum & Haryanto, 2020). Tolak ukur yang menjadi acuan dalam teknik analisis ini adalah :

1) Rasio Desentralisasi Fiskal

$$RDD = \frac{PAD}{Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

2) Rasio Kemandirian

$$RK = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

3) Rasio Efektivitas

$$RE = \frac{Realisasi Penerimaan PAD}{Anggara PAD} \times 100\%$$

4) Rasio Keserasian

Rasio Keserasian Belanja Operasi

$$RBO = \frac{Total Belanja Operasi}{Total Belanja Daerah} \times 100\%$$

Rasio Keserasian Belanja Modal

$$RBM = \frac{Total Belanja Modal}{Total Belanja Daerah} \times 100\%$$

5) Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$RPP = \frac{PAD_{tahun t} - PAD_{tahun t-1}}{PAD_{tahun t-1}} \times 100\%$$

Perhitungan data keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan rumus analisis rasio keuangan pemerintah daerah yang sudah disajikan diatas, selanjutnya

melakukan analisis terhadap masing-masing rasio yang dihasilkan. Hasil perhitungan rasio dikatakan berhasil apabila kinerja pemerintah daerah mampu dalam merealisasikan suatu perencanaan (Setianingrum & Haryanto, 2020).

Dari analisis rasio ini dapat dibandingkan kinerja anggaran antar provinsi dalam tahun yang sama. Dengan memvisualisasikan data penelitian ini melihat provinsi mana yang memiliki kinerja terbaik dan terburuk dalam aspek-aspek tertentu dari kinerja anggaran.

2. Analisis Heatmap dan Korelasi antar Metrik

Tahapan selanjutnya adalah analisis heatmap (peta panas). Analisis peta panas bertujuan untuk memberikan visualisasi grafis dari data numerik dengan menggunakan gradasi warna untuk menggambarkan variasi nilai dari setiap provinsi. Dalam konteks penelitian ini, peta panas digunakan untuk memvisualisasikan dan membandingkan kinerja keuangan daerah diseluruh provinsi di Indonesia selama tahun 2019 sampai 2022. Setelah melakukan analisis heatmap, kemudian kami membuat analisis metrik korelasi dengan menilai hubungan antara berbagai metrik kinerja anggaran. Ini dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi pearson antara pasangan metrik. Hasilnya memberikan gambaran tentang bagaimana suatu metrik mungkin mempengaruhi metrik lainnya, menunjukkan hubungan yang mungkin ada antara variabel-variabel tersebut.

3. Analisis Klaster

Analisis klaster adalah teknik pengelompokan yang bertujuan untuk mengelompokkan provinsi kedalam klaster atau kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik kinerja anggaran mereka. Dalam analisis ini, kami menggunakan metode K-Means untuk mengidentifikasi klaster. Setelah klaster diidentifikasi, kami menganalisis karakteristik utama dari setiap klaster dan memberikan profil untuk setiap klaster berdasarkan fitur-fitur utamanya. Ini membantu dalam memahami bagaimana provinsi berbeda satu sama lain berdasarkan kinerja anggaran mereka dan memberikan wawasan tentang area mana yang mungkin memerlukan perhatian khusus.

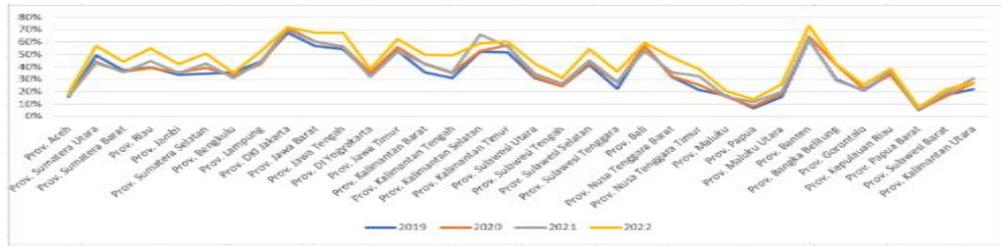
C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari djpk.kemenkeu.go.id yaitu Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2022. APBD merupakan rencana keuangan daerah selama satu periode satu tahun anggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD mencakup 3 unsur utama pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah di Indonesia pada tahun 2019 sampai tahun 2022 yang paling tinggi yaitu provinsi DKI Jakarta dan terendah yaitu provinsi Gorontalo. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 terjadi kenaikan

pendapatan daerah sementara pada tahun 2021 mengalami penurunan, pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali tetapi ada beberapa provinsi yang mengalami penurunan.

Untuk belanja daerah di Indonesia tertinggi pada tahun 2019 sampai 2022 yaitu DKI Jakarta sedangkan untuk belanja daerah di Indonesia terendah yaitu provinsi Gorontalo. Sementara itu untuk komponen pembiayaan daerah pada tahun 2019 yang paling tinggi yaitu provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 6.125.344.204.491 dan yang terendah provinsi Lampung sebesar Rp-115.000.000.000, pada tahun 2020 komponen pembiayaan daerah tertinggi yaitu provinsi Jawa Barat sebesar Rp 4.412.108.362.430 dan terendah provinsi DKI Jakarta sebesar Rp-2.585.559.158.620, pada tahun 2021 pembiayaan daerah tertinggi yaitu provinsi Banten sebesar Rp 4.315.122.370.550 dan provinsi terendah yaitu provinsi Lampung sebesar Rp-112.780.000.000, pada tahun 2022 pembiayaan daerah yang paling tinggi yaitu provinsi Aceh sebesar Rp 2.817.667.273.688 dan terendah yaitu provinsi DKI Jakarta sebesar Rp-1.691.476.984.000.

1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Rasio desentralisasi fiskal yaitu menggambarkan kewenangan serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan. Semakin besar PAD maka semakin besar pula kapasitas pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi (Sugeha et al., 2015).



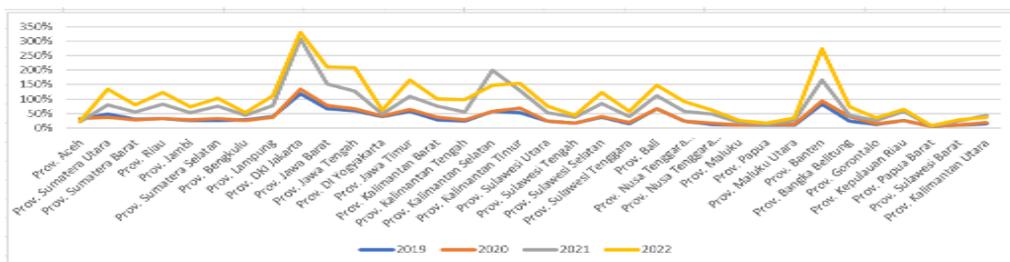
Gambar 1. Rasio Desentralisasi Fiskal

Terdapat varian yang signifikan antara provinsi dalam hal desentralisasi fiskal. Beberapa provinsi menunjukkan peningkatan pada desentralisasi fiskal sepanjang waktu, sementara yang lainnya menunjukkan penurunan. Ini mungkin menunjukkan perubahan kebijakan atau pendekatan pemerintah pusat terhadap pemberian otonomi fiskal kepada provinsi. Dilihat pada gambar 1 diatas, hasil perhitungan rata-rata rasio desentralisasi fiskal tahun 2019 sampai 2022 yang tertinggi yaitu provinsi DKI Jakarta sebesar 70% dimana secara umum provinsi DKI Jakarta ini masuk kedalam kategori “Sangat Baik” yaitu berada pada kisaran lebih dari 50%, dimana hal tersebut menunjukkan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan sangat baik didalam pembangunan daerah. Provinsi DKI Jakarta dikatakan sangat baik

didalam penyelenggaraan desentralisasi, hal ini dapat dilihat dari kontribusi masyarakat dalam hal pembayaran pajak serta retribusi daerah. Sedangkan terendah yaitu provinsi Papua Barat sebesar 6%, dimana jika dilihat secara umum masih termasuk dalam kategori “Sangat Kurang” yakni berada pada kisaran 0-10%. Dimana hal ini kewenangan serta tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sangat kurang, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran pajak serta retribusi daerah.

2) Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat kemampuan daerah untuk membiayai sendiri dalam kegiatan pemerintah, pembangunan dan layanan bagi masyarakat yang telah membayar pajak dan perpajakan sebagai sumber pendapatan daerah (Sartika, 2019).



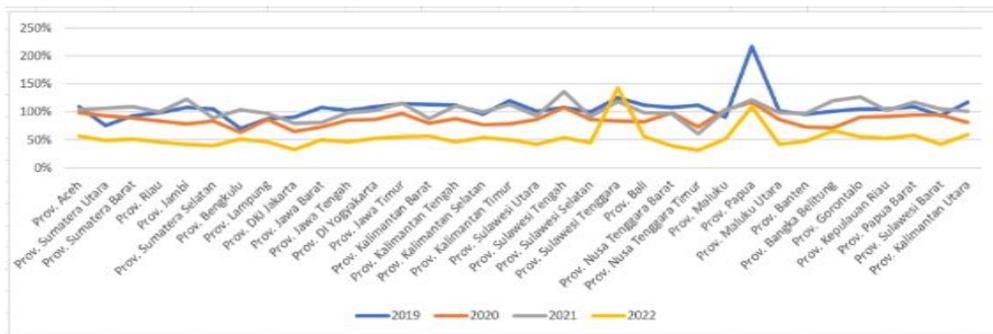
Gambar 2. Rasio Kemandirian

Beberapa provinsi menunjukkan kemandiriannya tinggi, hal tersebut menunjukkan mereka kurang bergantung pada dana pusat. Namun, ada juga provinsi yang kemandiriannya menurun sepanjang waktu, mungkin karena meningkatnya ketergantungan pada dana pusat atau perubahan dalam sumber pendapatan lokal. Dilihat pada gambar 2 diatas, hasil rata-rata rasio kemandirian tertinggi yaitu provinsi DKI Jakarta sebesar 222%, dimana berdasarkan rasio kemandirian secara umum provinsi DKI Jakarta berada pada kategori “Tinggi” pola hubungan pemerintah daerah yaitu “Delegatif”, pemerintah daerah dianggap sudah mampu

dalam menjalankan urusan ekonomi dan menggali potensi daerahnya dan tidak tergantung pada pemerintah pusat. Sedangkan terendah yaitu provinsi Papua Barat sebesar 7% secara umum rasio kemandirian tergolong “Rendah Sekali” pola hubungannya yaitu “Instruktif”, hal ini berarti provinsi Papua Barat belum mampu secara mandiri masih bergantung pada pemerintah pusat.

3) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas yaitu mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan PAD yang sudah direncanakan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan berdasarkan potensi nyata suatu daerah (Fathah, 2017).



Gambar 3. Rasio Efektivitas

Secara umum, terdapat peningkatan efektivitas disebagian besar provinsi dari tahun 2019 hingga 2022. Namun beberapa provinsi menunjukkan fluktuasi, dengan peningkatan efektivitas pada tahun-tahun tertentu dan penurunan pada tahun-tahun lainnya. Dilihat pada gambar 3 diatas, hasil rata-rata rasio efektivitas tahun 2019 hingga 2022 tertinggi yaitu provinsi Papua sebesar 141%, jika dilihat rasio efektivitas provinsi Papua “Sangat

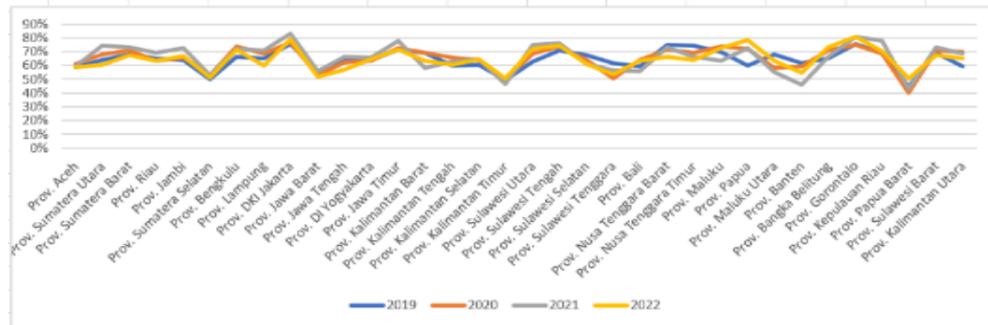
Efektif”, dimana dalam merealisasikan PAD pemerintah daerahnya sangat baik, karena provinsi Papua mampu mewujudkan PAD yang sudah ditargetkan. Sedangkan yang terendah yaitu provinsi DKI Jakarta sebesar 67% secara umum berada pada kategori “Tidak Efektif”, itu artinya kemampuan pemerintahnya belum optimal dalam mewujudkan PAD.

4) Rasio Keserasian

Rasio keserasian dibagi menjadi dua

yaitu rasio keserasian belanja operasi dan rasio keserasian belanja modal. Pada rasio keserasian belanja operasi menggambarkan hasil dari pengukuran pembagian antara belanja rutin dengan total belanja,

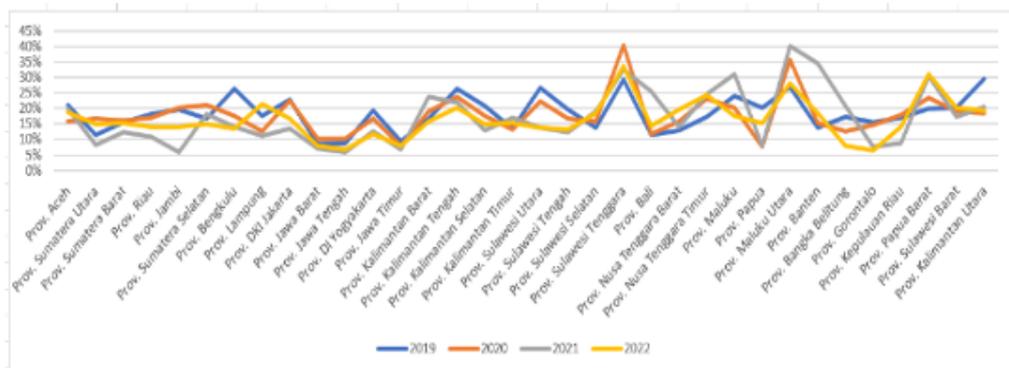
sedangkan untuk belanja modal yaitu hasil perhitungan dari pembagian belanja modal dengan total belanja (Mulyaningsih & Sunaningsih, 2022).



Gambar 4. Rasio Keserasian Belanja Operasi

Terdapat variasi antar provinsi dalam hal belanja. Belanja operasi mencerminkan biaya operasional pemerintahan provinsi. Berdasarkan data yang tercantum pada gambar 4 diatas, hasil rata-rata dari belanja operasi yang paling tinggi provinsi

DKI Jakarta dan provinsi Gorontalo sebesar 78%, dimana secara umum rasio belanja operasi berada pada kategori “Baik” sedangkan provinsi Papua Barat sebesar 45% berada pada kategori “Tidak Baik”.



Gambar 5. Rasio Keserasian Belanja Modal

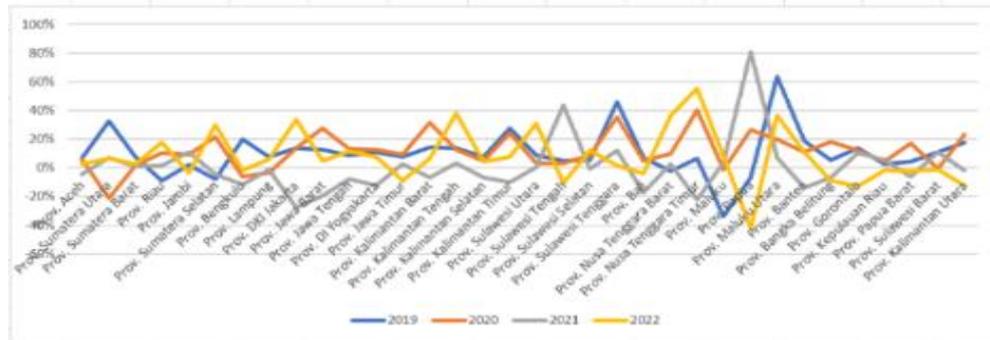
Terdapat variasi antar provinsi dalam hal belanja modal. Beberapa provinsi menunjukkan peningkatan belanja modal, menunjukkan investasi yang lebih besar dari infrastruktur dan proyek-proyek

modal. Berdasarkan data yang tercantum pada gambar 5 diatas, rata-rata rasio belanja modal paling tinggi provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 34%. Sedangkan yang terendah yaitu provinsi Jawa Barat,

Jawa Tengah, Jawa Timur sebesar 8%. Pada rasio belanja modal semua provinsi berada pada kategori “Kurang Baik” yakni berada pada kisaran 0-50%.

Menurut rasio keserasian diatas bahwa sebagian besar dari dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah masih difokuskan untuk belanja operasi oleh sebab itu belanja modal relatif rendah.

5) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Rasio pertumbuhan pendapatan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilan dari satu periode ke periode berikutnya, baik dalam hal pendapatan ataupun dalam sumber belanja (Fathah, 2017).



Gambar 6. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Beberapa provinsi menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang stabil, sementara yang lainnya menunjukkan fluktuasi, ini mungkin mencerminkan perubahan dalam perekonomian lokal atau efektivitas dalam pengumpulan pajak dan sumber pendapatan lainnya. Berdasarkan data pada gambar 6, hasil rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan provinsi paling tinggi yaitu provinsi Maluku Utara sebesar 32%. Jika berdasarkan rasio pertumbuhan pendapatan secara umum tergolong dalam kategori “Sedang” serta provinsi yang paling rendah yaitu provinsi Maluku sebesar -6% berada dalam kategori “Sangat Rendah”.

1. Analisis Heatmap

a. Rasio Desentralisasi Fiskal

Jika dilihat pada heatmap rasio desentralisasi fiskal diseluruh provinsi pada tahun 2019 hingga 2022 yang paling tinggi yaitu provinsi DKI Jakarta sebesar 0.68;0.70;0.72;0.72, jika dilihat pada heatmap provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 hingga 2022 terjadi kenaikan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan provinsi DKI Jakarta memiliki kemampuan keuangan daerahnya sangat baik dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sedangkan provinsi yang paling rendah yaitu provinsi Papua Barat sebesar 0.05;0.06;0.06;0.07, jika dilihat pada heatmap provinsi Papua Barat pada tahun 2019 sampai 2022 mengalami kenaikan, tetapi berada pada kategori paling rendah, hal ini karena kemampuan daerah provinsi

Papua Barat sangat kurang dalam meningkatkan kemampuan pendapatan asli daerah.

b. Rasio kemandirian

Jika dilihat pada heatmap rasio kemandirian diseluruh provinsi pada tahun 2019 sampai 2022 provinsi paling tinggi yaitu provinsi DKI Jakarta sebesar 1.19;1.33;3.08;3.30, pada heatmap rasio kemandirian provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan, hal ini provinsi DKI Jakarta sudah mampu secara mandiri dalam melaksanakan segala urusan otonomi daerah serta tidak tergantung kepada pemerintah pusat. Sedangkan yang paling rendah yaitu provinsi Papua Barat sebesar 0.05;0.06;0.07;0.08, pada rasio kemandirian provinsi Papua Barat mengalami kenaikan, akan tetapi provinsi Papua Barat belum mampu secara mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah, masih bergantung pada pemerintah pusat.

c. Rasio efektifitas

Jika dilihat pada heatmap rasio efektifitas seluruh provinsi pada tahun 2019 sampai 2022 provinsi paling tinggi yaitu provinsi Papua sebesar 2.16;1.17;1.21;1.08, hal ini tergolong sangat efektif kinerja keuangannya, walaupun demikian provinsi Papua mengalami perkembangan secara fluktuasi, karena pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 2.16 menjadi 1.17 pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari 1.17 menjadi 1.21 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 1.21 menjadi 1.08, hal ini terjadi karena ada ketidaksempurnaan dalam mencapai target PAD yang semula direncanakan oleh pemerintah sebelumnya. Sedangkan yang paling rendah yaitu provinsi DKI Jakarta sebesar 0.90;0.65;0.80;0.32, pada tahun 2019 sampai 2022 mengalami

perkembangan secara fluktuasi, pada tahun 2020 terjadi penurunan dari 0.90 menjadi 0.65, tahun 2021 terjadi kenaikan dari 0.65 menjadi 0.80 dan pada tahun 2022 terjadi penurunan dari 0.80 menjadi 0.32, hal ini provinsi DKI Jakarta tergolong tidak efektif.

d. Rasio Belanja Operasi

Jika dilihat pada heatmap rasio belanja operasi seluruh provinsi pada tahun 2019 sampai 2022 tertinggi yaitu provinsi DKI Jakarta sebesar 0.76;0.76;0.83;0.79 serta provinsi Gorontalo sebesar 0.75;0.75;0.80;0.81, pada provinsi DKI Jakarta terjadi kenaikan dan penurunan sementara provinsi Gorontalo terjadi kenaikan. Sedangkan provinsi paling rendah yaitu provinsi Papua Barat sebesar 0.45;0.40;0.43;0.51, terjadi kenaikan dan penurunan pada provinsi Papua Barat dimana pada tahun 2020 terjadi penurunan dari 0.45 menjadi 0.40, pada tahun 2021 terjadi kenaikan dari 0.40 menjadi 0.43.

e. Rasio Belanja Modal

Jika dilihat pada heatmap rasio belanja modal seluruh provinsi pada tahun 2019 sampai 2022, yang paling tinggi yaitu provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0.29;0.40;0.32;0.34, setiap tahunnya belanja modal pada provinsi Sulawesi Tenggara terjadi kenaikan dan penurunan, tahun 2020 terjadi kenaikan dari 0.29 menjadi 0.40, tahun 2021 terjadi penurunan dari 0.40 jadi 0.32 serta tahun 2022 terjadi kenaikan dari 0.32 jadi 0.34. Sedangkan yang paling rendah ada 3 provinsi yaitu provinsi Jawa Barat sebesar 0.09;0.10;0.07;0.08, provinsi Jawa Tengah sebesar 0.09;0.10;0.06;0.07 dan provinsi Jawa Timur sebesar 0.09;0.08;0.07;0.08, dari ketiga provinsi tersebut terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya pada belanja modal.

f. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Jika dilihat pada heatmap rasio pertumbuhan pendapatan seluruh provinsi pada tahun 2019 sampai 2022, yang paling tinggi yaitu provinsi Maluku Utara sebesar 0.63;0.20;0.07;0.36, pada provinsi Maluku Utara setiap tahunnya terjadi kenaikan dan penurunan, pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan sedangkan tahun 2022 terjadi kenaikan. Sedangkan yang paling rendah yaitu provinsi Maluku sebesar -0.34;0.01;0.04;0.08, setiap tahunnya terjadi kenaikan, hal ini dapat dikatakan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan terjadi pertumbuhan positif.

g. Hubungan Rasio Desentralisasi dan Rasio Kemandirian

Jika dilihat pada heatmap rasio desentralisasi dengan rasio kemandirian, provinsi DKI Jakarta dan provinsi Banten mempunyai nilai yang sangat tinggi, setiap tahunnya mengalami kenaikan. Provinsi DKI Jakarta dan provinsi Banten dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya sangat baik, serta sudah sangat mampu secara mandiri dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan secara tidak bergantung kepada pemerintah pusat.

h. Rasio Efektivitas dan Rasio Belanja Operasi

Jika dilihat pada heatmap rasio efektivitas dan rasio belanja operasi provinsi Sulawesi Tenggara dan provinsi Papua tidak memiliki nilai yang sama, karena pada rasio efektivitas nilainya tinggi sedangkan pada rasio belanja operasi rendah. Alasannya pada rasio efektivitas disebabkan pendapatan pajak serta retribusi daerah melebihi besaran anggaran sebelumnya.

i. Rasio Belanja Modal dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Jika dilihat pada heatmap rasio belanja modal dengan rasio pertumbuhan pendapatan provinsi Maluku Utara memiliki nilai yang sama besar, hal ini menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan pada provinsi Maluku Utara termasuk pada kategori sedang dan merupakan nilai tertinggi dari keseluruhan provinsi.

j. Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal

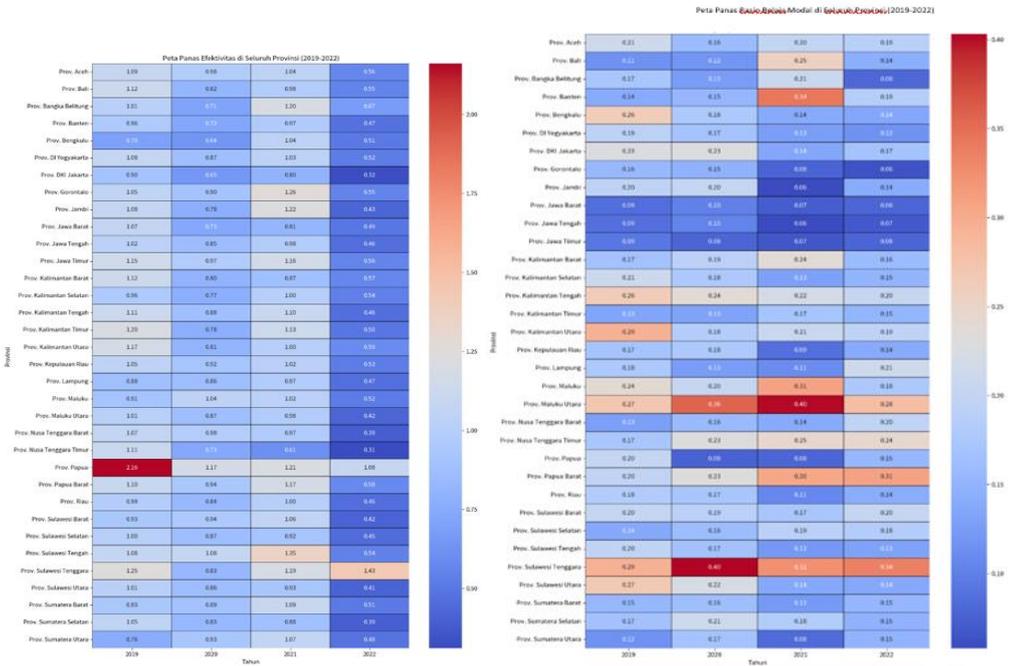
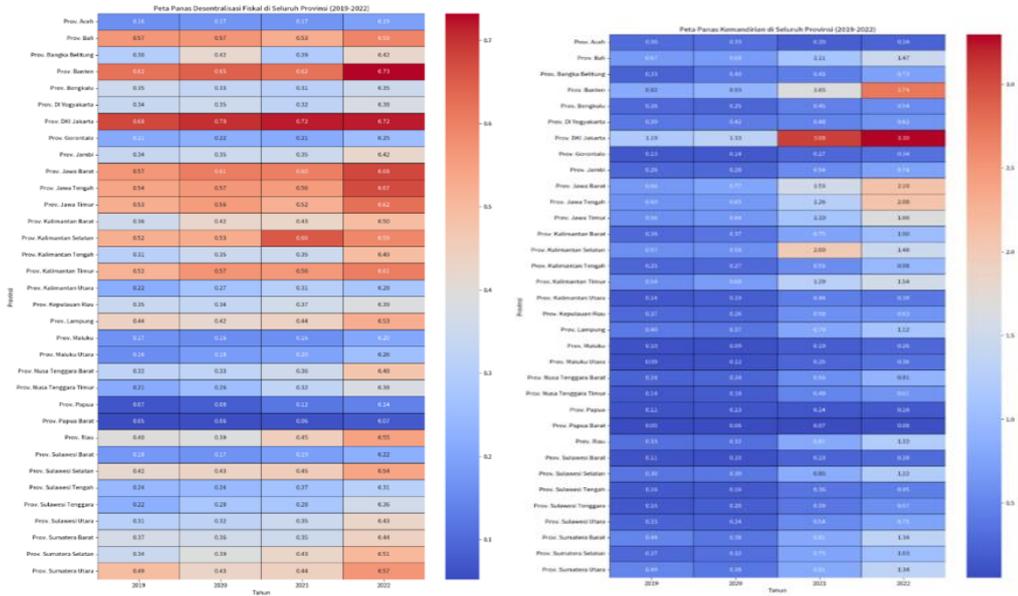
Jika dilihat pada heatmap rasio belanja operasi dengan belanja modal, seluruh provinsi berbeda nilainya, seperti provinsi DKI Jakarta dan provinsi Gorontalo belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja modal, karena Sebagian besar dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah masih diprioritaskan pada belanja operasi sehingga belanja modalnya sedikit.

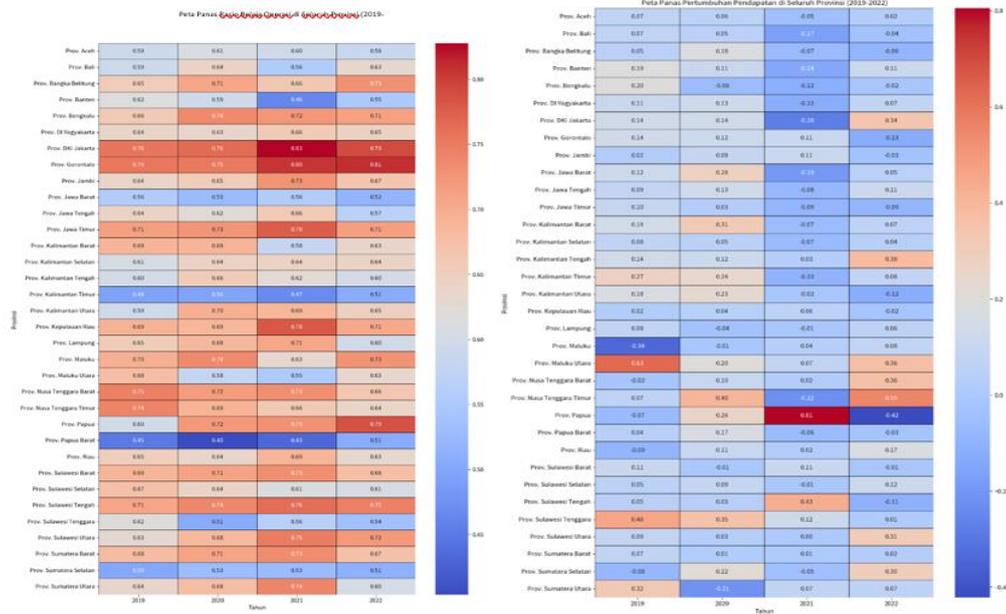
k. Rasio Kemandirian dan Rasio Belanja Modal

Jika dilihat pada heatmap rasio kemandirian dengan rasio belanja modal setiap provinsi berbeda, seperti dilihat pada provinsi DKI Jakarta rasio kemandiriannya tinggi itu artinya provinsi DKI Jakarta dalam rasio kemandiriannya sudah sangat mampu secara mandiri melaksanakan otonomi daerah, hal ini pemerintah provinsi DKI Jakarta mampu melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta mendanai belanja modal sendiri tanpa menunggu transfer dana dari pemerintah pusat. Sehingga rasio kemandirian dengan rasio belanja modal sangat berpengaruh positif.

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
 e-ISSN 2614-2945 Volume 10 Nomor 3, Bulan Desember Tahun 2023
 Dikirim penulis: 11-10-2023, Diterima: 02-11-2023, Dipublikasikan: 29-12-2023

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2023 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)





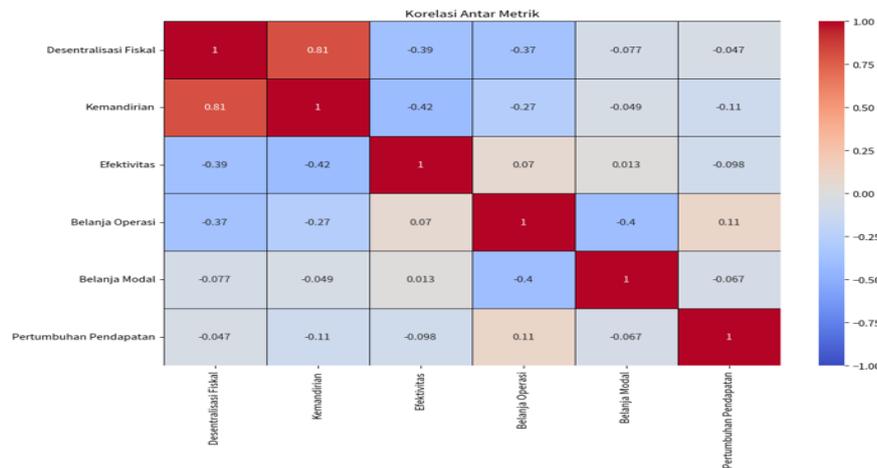
2. Korelasi Antar Metrik :

Korelasi antara setiap pasangan metrik dihitung untuk memahami hubungan antara masing-masing rasion. Korelasi akan diukur dengan koefisien korelasi person, yang berkisaran antara -1 (korelasi negatif sempurna) hingga 1 (korelasi positif sempurna). Nilai mendekati 0 menunjukkan tidak ada korelasi yang signifikan.

Heatmap (peta panas) yang menunjukkan korelasi antar metrik ditunjukkan dengan warna yang lebih hangat (menuju merah) menunjukkan

korelasi positif yang sangat kuat, warna yang lebih dingin (menuju biru) menunjukkan korelasi negatif yang kuat, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan tidak ada korelasi yang signifikan.

Dari heatmap ini kami mengamati beberapa temuan menarik, yaitu “Desentralisasi Fiskal” memiliki korelasi positif sangat kuat dengan “Kemandirian”, “Efektivitas” memiliki korelasi negatif dengan “Belanja Operasi” serta “Belanja Modal” memiliki korelasi positif dengan “Pertumbuhan Pendapatan”.



Pada korelasi antar metrik desentralisasi fiskal dan kemandirian, terdapat korelasi positif yang kuat antara “Desentralisasi Fiskal” dan “Kemandirian”. Provinsi DKI Jakarta dan provinsi Bali adalah contoh provinsi dengan tingkat desentralisasi fiskal dan kemandirian yang tinggi. Kedua provinsi ini memiliki sumber pendapatan lokal yang signifikan, seperti pajak daerah dan retribusi daerah, yang memungkinkan mereka untuk memiliki kemandirian yang lebih besar dari dana pusat.

Pada korelasi antar efektivitas dan belanja operasi, “Efektivitas” memiliki korelasi negatif dengan “Belanja Operasi”, provinsi Aceh dan provinsi Papua, misalnya memiliki efektivitas yang relatif tinggi namun belanja operasi yang lebih rendah. Hal ini mungkin mencerminkan efisiensi dalam mengelola biaya operasional dan prioritas anggaran yang lebih fokus pada investasi daripada operasional.

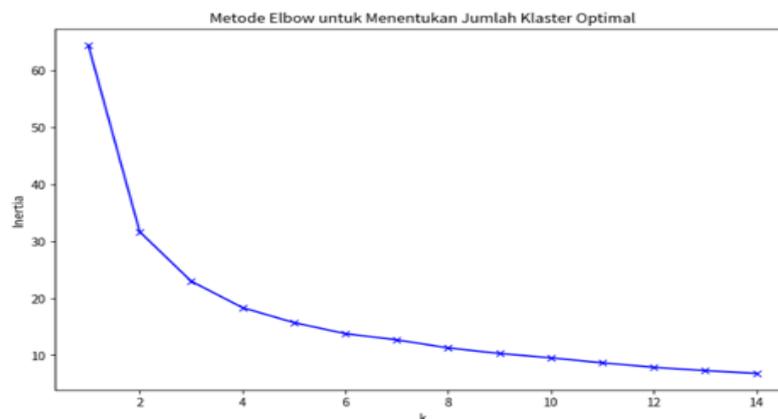
Pada korelasi belanja modal dan pertumbuhan pendapatan, terdapat korelasi positif antara “Belanja Modal” dan “Pertumbuhan Pendapatan”. Provinsi Kalimantan Timur dan provinsi Riau adalah contoh provinsi yang

mengalokasikan dana yang signifikan untuk belanja modal menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang cepat. Investasi dalam infrastruktur di kedua provinsi ini, terutama persoalan yang berkaitan dengan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), mungkin telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi mereka.

3. Analisis Kluster :

Tujuan dari analisis kluster adalah untuk mengelompokkan provinsi kedalam kluster ataupun kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik mereka. Didalam konteks ini, karakteristik adalah metrik kinerja anggaran yang ada dari hasil analisis sebelumnya. Penelitiannya menggunakan metode klasterisasi K-Means, yang merupakan salah satu metode klasterisasi yang paling umum digunakan. Namun, sebelum itu, perlu ditentukan jumlah kluster yang optimal.

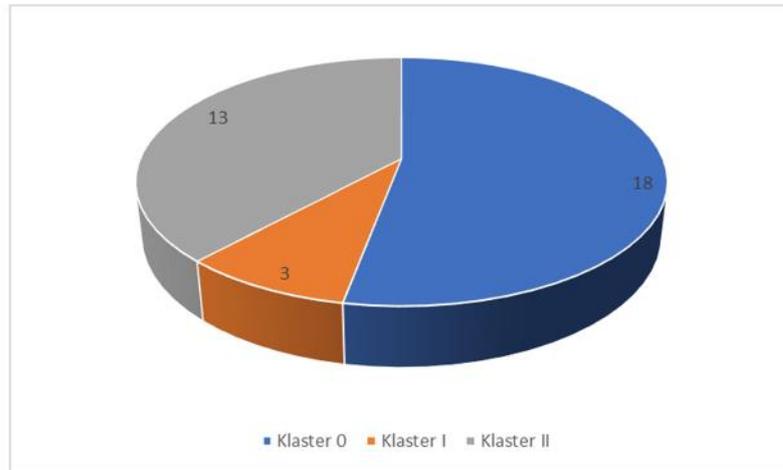
Langkah pertama adalah menentukan jumlah kluster yang optimal menggunakan metode “Elbow”. Metode ini melibatkan menjalankan klasterisasi K-Means pada dataset untuk berbagai nilai k (jumlah kluster) dan kemudian untuk setiap nilai k menghitung jumlah kuadrat dari jarak antara kluster yang optimal.



Dari plot “Elbow”, kita dapat melihat bahwa titik “siku” terletak disekitar k=3 atau k=4. Ini menunjukkan bahwa 3 atau 4 klaster mungkin merupakan jumlah klaster yang optimal

untuk data.

Untuk tujuan analisis ini, kami memilih k=3 dan lanjutan dengan klasterisasi K-Means menggunakan 3 klaster.



Prov. Aceh, Prov. Bangka Belitung, Prov. Bengkulu, Prov. DI Yogyakarta, Prov. Gorontalo, Prov. Jambi, Prov. Kalimantan Barat, Prov. Kalimantan Tengah, Prov. Kalimantan Utara, Prov. Kepulauan Riau, Prov. Maluku, Prov. Nusa Tenggara Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur, Prov. Papua, Prov. Sulawesi Barat, Prov. Sulawesi Tengah.

Prov. Sulawesi Utara, Prov. Sumatera

Klaster 0 :

Klaster ini terdiri dari provinsi-provinsi yang cenderung memiliki karakteristik serupa dalam hal metrik yang dianalisis. Banyak provinsi diklaster ini yang merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang moderat dan memiliki tingkat kemandirian fiskal yang relatif rendah. Sebagian besar provinsi diklaster ini merupakan daerah dengan mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, tetapi belum sepenuhnya dioptimalkan untuk meningkatkan

Barat, Provinsi Papua Barat.

Prov. Maluku Utara, Prov. Papua Barat, Prov. Sulawesi Tenggara, Prov. Bali, Prov. Banten, Prov. DKI Jakarta, Prov. Jawa Barat, Prov. Jawa Tengah, Prov. Jawa Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Prov. Kalimantan Timur, Prov. Lampung, Prov. Riau, Prov. Sulawesi Selatan, Prov. Sumatera Utara.

pendapatan daerah.

Beberapa provinsi diklaster ini juga memiliki tantangan dalam hal efisiensi belanja terutama dalam belanja operasi.

Provinsi : Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, DI Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sumatera Barat.

Klaster 1 :

Klaster 1 ini terdiri dari provinsi-provinsi yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari klaster lainnya. Provinsi-provinsi diklaster ini cenderung memiliki tingkat kemandirian fiskal lebih tinggi dibandingkan provinsi diklaster lain. Meskipun demikian, beberapa provinsi diklaster ini masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas pengelolaan anggaran.

Provinsi : Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Tenggara.

Klaster 2 :

Klaster ini terdiri dari provinsi-provinsi yang cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi. Banyak provinsi diklaster ini merupakan pusat ekonomi di Indonesia, seperti provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Provinsi-provinsi diklaster ini cenderung mempunyai efisiensi belanja yang lebih baik dan bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Provinsi : Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Lampung, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan berbagai dinamika dalam rasio keuangan daerah berbagai provinsi di Indonesia. DKI Jakarta menunjukkan rasio desentralisasi fiskal yang tinggi, dimana pemerintah daerah memiliki otonomi yang besar dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD, semakin besar kapasitas pemerintah daerah untuk

menjalankan desentralisasi (Sugeha et al., 2015). DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, memiliki sumber daya dan potensi ekonomi yang besar, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengumpulkan pendapatan yang signifikan dari berbagai sumber. DKI Jakarta menunjukkan rasio kemandirian tinggi, yang menunjukkan pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahannya tanpa bergantung pada dana pusat. Hal tersebut selaras dengan penelitian Nurhayati (2015), menyatakan bahwa rasio kemandirian menggambarkan kemampuan daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah.

Meskipun DKI Jakarta memiliki rasio desentralisasi fiskal dan kemandirian yang tinggi, rasio efektivitasnya relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ada tantangan dalam merealisasikan PAD yang sudah direncanakan. Faktor-faktor seperti perubahan kebijakan, fluktuasi ekonomi, atau ketidaksempurnaan dalam proses pengumpulan pajak mungkin mempengaruhi efektivitas pengumpulan PAD (Maulina & Rhea, 2019).

Data menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi cenderung mengalokasikan dana yang lebih besar untuk belanja operasi daripada belanja modal. Hal ini mungkin mencerminkan prioritas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari daripada investasi jangka Panjang. Namun, investasi dalam infrastruktur dan proyek modal lainnya penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka Panjang (Rahman et al., 2022).

Fluktuasi dalam rasio pertumbuhan pendapatan diberbagai provinsi mencerminkan perubahan dalam perekonomian lokal, efektivitas

pengumpulan pajak atau perubahan kebijakan.

Korelasi positif antara “Desentralisasi Fiskal” dan “Kemandirian” menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan otonomi fiskal yang lebih besar cenderung mempunyai kemampuan keuangan yang lebih mandiri. Hal ini sesuai dengan logika bahwa pemerintah daerah dengan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan PAD akan mempunyai kemandirian yang lebih besar dari dana pusat.

Heatmap menunjukkan variasi signifikan dalam kinerja keuangan antar provinsi dari tahun ke tahun. Provinsi seperti DKI Jakarta menonjol dalam beberapa metrik, menunjukkan kinerja keuangan yang kuat, sementara provinsi lain seperti Papua Barat menunjukkan kinerja yang lebih rendah.

Korelasi antar metrik memberikan wawasan tentang hubungan antara berbagai aspek kinerja keuangan. Misalnya, terdapat korelasi positif yang kuat antara “Desentralisasi Fiskal” dan “Kemandirian”, menunjukkan bahwa provinsi dengan kemampuan pendapatan daerah yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kemandirian lebih besar dari dana pusat.

Analisis Klaster :

Klasterisasi mengungkapkan tiga kelompok provinsi dengan karakteristik kinerja keuangan yang berbeda. Klaster pertama mencakup provinsi dengan pertumbuhan ekonomi moderat dan kemandirian fiskal yang relatif rendah. Klaster kedua terdiri dari provinsi dengan kemandirian fiskal yang lebih tinggi namun menghadapi tantangan dalam efektivitas pengelolaan anggaran. Klaster ketiga mencakup provinsi yang merupakan

pusat ekonomi di Indonesia dengan efisiensi belanja dan kemandirian fiskal yang tinggi.

Analisis klaster yang dilakukan menunjukkan bagaimana provinsi-provinsi di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik kinerja anggaran mereka. Ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana sumber daya dan kebijakan dikelola di berbagai provinsi dan bagaimana hal itu mempengaruhi kinerja ekonomi dan fiskal mereka.

Klaster 0 mencakup provinsi-provinsi dengan pertumbuhan ekonomi moderat dan kemandirian fiskal yang relatif rendah. Menariknya, banyak provinsi diklaster ini kaya akan sumber daya alam. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan sumber daya alam yang melimpah sering kali menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi mereka, fenomena yang dikenal sebagai “*curse of natural resources*” atau kutukan sumber daya alam (Haryanto, 2018). Meskipun memiliki potensi besar, tanpa manajemen yang tepat, sumber daya ini bisa menjadi beban daripada berkah.

Provinsi diklaster 1 menunjukkan kemandirian fiskal yang lebih tinggi. Namun, efektivitas provinsi pengelolaan anggaran masih menjadi tantangan. Ini mengingatkan kita pada konsep “Middle-income trap”, dimana daerah atau negara mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi menghadapi kesulitan untuk melanjutkan pertumbuhan dan mencapai status pendapatan tinggi (Asmirawati, 2017). Meskipun memiliki kemandirian fiskal, tanpa reformasi structural dan peningkatan efisiensi, pertumbuhan bisa terhambat.

Pada provinsi yang masuk pada klaster 2, klaster ini mencakup provinsi-provinsi yang merupakan pusat ekonomi di Indonesia. Efisiensi belanja dan kemandirian fiskal yang tinggi diklaster ini menunjukkan manajemen sumber daya yang baik dan kebijakan fiskal yang sehat. Ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa daerah perkotaan dan industri cenderung memiliki infrastruktur yang lebih baik, akses ke pasar dan kebijakan yang mendukung perubahan (Perdana et al., 2023).

D. KESIMPULAN

Hal temuan ini menunjukkan bahwa ada variasi signifikan dalam kinerja keuangan antar provinsi, yang dapat mencerminkan perbedaan dalam prioritas anggaran, efisiensi pengeluaran dan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang disesuaikan untuk meningkatkan kinerja keuangan disetiap provinsi.

Adapun saran dari kebijakan yang disampaikan dari hasil penelitian adalah dalam hal peningkatan kapasitas pendapatan daerah, pemerintah pusat harus memberikan pelatihan dan sumber daya kepada provinsi dengan kinerja keuangan yang rendah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengumpulkan pendapatan daerah. Dalam hal efisiensi belanja, provinsi harus diberi insentif untuk meningkatkan efisiensi belanja, khususnya dalam belanja operasi, untuk memastikan bahwa dana dialokasikan dengan cara yang paling efektif. Dalam hal pendekatan berbasis data, pemerintah daerah harus didorong untuk menggunakan analisis data dalam proses pengambilan keputusan anggaran untuk memastikan

alokasi sumber daya yang optimal. Dalam hal kerjasama antar provinsi, mengingat variasi kinerja keuangan antar provinsi, ada peluang bagi provinsi dengan kinerja keuangan yang tinggi untuk berbagai praktik terbaik dan pelajaran yang dipelajari dengan provinsi lain. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan ruang lingkup data yang terbatas pada data kinerja APBD provinsi di Indonesia tanpa mempertimbangkan data keuangan dari tingkat kabupaten atau kota. Oleh karena itu, analisis mungkin tidak mencerminkan gambaran lengkap dari kinerja keuangan diseluruh wilayah. Hal lain yaitu metodologi klasterisasi, meskipun metode “Elbow” digunakan untuk menentukan jumlah klaster yang optimal, pemilihan jumlah klaster selalu memiliki unsur subjektivitas. Selain itu, metode klasterisasi lain mungkin menghasilkan hasil yang berbeda. Keterbatasan lain yaitu mengenai dinamika waktu, dimana penelitian ini merupakan potret statis dari kinerja keuangan provinsi pada titik waktu tertentu, tanpa mempertimbangkan tren atau perubahan sepanjang waktu.

Untuk itu peneliti menyarankan saran penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, yaitu analisis tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapat gambaran yang lebih holistik tentang kinerja keuangan di Indonesia, penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis ketinggian Kabupaten/Kota serta penggabungan metrik tambahan dimana penelitian selanjutnya dapat memasukkan lebih banyak rasio atau metrik keuangan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kinerja keuangan. Penerapan metodologi klasterisasi

alternatif juga dapat dipertimbangkan untuk memvalidasi temuan dari penelitian ini, metode klasterisasi lain seperti Hierarchical Clustering atau DBSCAN dapat diterapkan pada dataset yang sama.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Arnaldi, & Yusra, I. (2020). Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2018 untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Pundi*, 3(1), 83–100. <https://doi.org/10.31575/jp.v4i1.182>
- Asmirawati. (2017). ANALISIS MIDDLE INCOME TRAP DI INDONESIA. *Jurnal Ecosains*, 6, 1–14.
- Aziz, A. (2016). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur). *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 86–101. <https://doi.org/10.26533/eksis.v11i1.34>
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis Dan Perbankan*, 8(1), 33–48. <http://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/download/109/97>
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34–38. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Haryanto, J. T. (2018). KEMANDIRIAN DAERAH DAN PROSPEK EKONOMI WILAYAH KALIMANTAN. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3, 312–328.
- Karlina, A., & Handayani, N. (2017). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD di kota Surabaya tahun 2012-2015. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)*, 6(3), 910–924. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/988/1011>
- Malik, A. D. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Tarakan tahun 2009-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(2), 482–490. <https://doi.org/10.29264/jakt.v19i2.11293>
- Maulina, F., & Rhea. (2019). ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2, 11–22.
- Mulyaningsih, A. P., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus: BPPKAD Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020). *Journal of Information System, Applied*,

- Management, Accounting and Research*, 6(3), 612–622.
<https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i3.819>
- Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27–34.
- Nurhayati. (2015). ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 4, 55–66.
<https://www.neliti.com/publications/59103/analisis-rasio-keuangan-untuk-mengukur-kinerja-pemerintah-daerah-kabupaten-rokan#id-section-content>
- Perdana, M. A. C., Sihombing, T. M., Chrisinta, D., Sahala, J., & Budaya, I. (2023). Pengaruh Dukungan Pemerintah, Infrastruktur, dan Akses Pasar terhadap Pertumbuhan Usaha Kewirausahaan di Wilayah Perkotaan. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(03), 149–161.
<https://doi.org/10.58812/sek.v1.i03>
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). ANALISIS RASIO KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA MANADO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MANADO TAHUN ANGGARAN 2011 - 2015. *Jurnal Accountability*, 06(01), 45–56.
<https://doi.org/10.32400/ja.16026.6>
- 1.2017.45-56
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7, 83–112.
<https://doi.org/10.52353/ama.v7i1.97> Refbacks
- Rahman, Y., Fauziannor, & Mastaqim, R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito Kota Banjarbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 378–406.
<http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jiebJilid>
- Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 738–747.
- Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Daerah Di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 136–145.
- Sari, N. C. F. (2014). Prinsip Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 3(2686–438), 1–25.
<https://core.ac.uk/download/pdf/230768973.pdf#:~:text=ANALISIS%20PENGUKURAN%20KINERJA%20PEMERINTAH%20DAERAH%20DENGAN%20MENGUNAKAN%20PRINSIP,Ekonomi%20Universitas%20Negeri%20Surabaya%20>

Email%20%3A%20nindy.cahya93

%40yahoo.com%20Abstract

Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 147–153.

<https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i2.1207>

Setianingrum, R. D., & Haryanto. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2), 1–15.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/27592>

Sugeha, F. F., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2015). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal Accountability*, 4(1),

<https://doi.org/10.32400/ja.8420.4.1.2015.131-139>.